

**PENGGUNAAN BAHASA DALAM KOMUNIKASI LINTAS BUDAYA DI PERBATASAN SULTENG-SULSEL: KAJIAN SOSIOLINGUISTIK***Language Use in Cross-Cultural Communication in the Central Sulawesi-South Sulawesi Border Area: A Sociolinguistic Study***Nur Eva, Yunidar, Ulfah**

Universitas Tadulako, Indonesia

Pos-el: neva0875@gmail.com, yunidar.untad@gmail.com, ulfahnaja75@gmail.com

**Abstrak**

Penggunaan bahasa di wilayah perbatasan antara Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan dipengaruhi secara kuat oleh kondisi sosial, historis, dan mobilitas masyarakat yang telah berlangsung lama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola penggunaan bahasa dalam komunikasi lintas budaya pada masyarakat Desa Mayoa, meliputi ranah keluarga, tempat kerja, dan ruang publik, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberlangsungannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif sosiolinguistik. Data berupa tuturan lisan masyarakat dari berbagai latar etnis seperti Bugis, Bare'e, dan Pamona, yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Sumber data mencakup interaksi sosial di lingkungan keluarga, aktivitas ekonomi di pasar, serta komunikasi dalam institusi formal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik simak, catat, dan wawancara, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat perbatasan memiliki kompetensi multibahasa yang tinggi dan adaptif. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai lingua franca dalam komunikasi lintas etnis, terutama dalam konteks formal seperti pendidikan, pemerintahan, dan interaksi publik karena sifatnya yang netral. Sementara itu, bahasa daerah seperti Bugis, Bare'e, dan Pamona tetap digunakan secara aktif dalam ranah keluarga dan komunitas sebagai simbol identitas, kedekatan emosional, dan solidaritas sosial. Fenomena alih kode dan campur kode terjadi secara intensif dalam interaksi sehari-hari, mencerminkan fleksibilitas linguistik dan kesadaran kontekstual penutur. Faktor-faktor utama yang memengaruhi praktik ini meliputi hubungan kekerabatan dan perkawinan campuran, mobilitas sosial dan ekonomi, pendidikan formal, lingkungan sosial-keagamaan, serta perkembangan teknologi dan media sosial. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa keberagaman bahasa di wilayah perbatasan tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang secara dinamis dalam suatu ekologi bahasa yang seimbang, sehingga penting untuk didukung melalui kebijakan pendidikan multibahasa dan pelestarian bahasa daerah.

**Kata-kata kunci:** komunikasi lintas budaya, masyarakat perbatasan, bilingualisme, alih kode.

**Abstract**

*Language use in the border region between Central Sulawesi and South Sulawesi is strongly influenced by long-standing social, historical, and mobility-related dynamics within the community. This study aims to analyze patterns of language use in cross-cultural communication among the people of Mayoa Village, covering the domains of family, workplace, and public spaces, as well as to identify the factors that support its sustainability. This research employs a qualitative approach with a descriptive sociolinguistic design. The data consist of spoken utterances from community members of diverse ethnic backgrounds, including Bugis, Bare'e, and Pamona, collected through in-depth interviews and participant observation. Data sources include social interactions within families, economic activities in the marketplace, and communication within formal institutions. Data were collected using observation, note-taking, and interview techniques, and analyzed through an interactive model involving data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that border communities demonstrate a high and adaptive level of multilingual competence. Indonesian functions as a lingua franca in cross-ethnic communication, particularly in formal contexts such as education, governance, and public interaction due to its neutrality. Meanwhile, local languages such as Bugis, Bare'e, and Pamona remain actively used in family and community domains as symbols of identity, emotional closeness, and social solidarity. The phenomena of code-switching and code-mixing occur intensively in everyday interactions, reflecting speakers' linguistic flexibility and contextual awareness. The main factors influencing these practices include kinship relations and interethnic marriages, socio-economic mobility, formal education, socio-religious environments, as well as the development of technology and social media. The study implies that linguistic diversity in border areas is not only maintained but also dynamically up q berkembang within a balanced language ecology, highlighting the importance of supporting multilingual education policies and the preservation of local languages.*

**Keywords:** cross-cultural communication, border communities, bilingualism, code-switching.

**Informasi Artikel**Naskah Diterima  
27 Januari 2026Naskah Direvisi akhir  
4 Mei 2026Naskah Diterbitkan  
13 Juni 2026**Cara Mengutip**Eva, N., Yunidar, & Ulfah. (2026). Penggunaan Bahasa dalam Komunikasi Lintas Budaya di Perbatasan Sulteng-Sulsel: Kajian Sociolinguistik. *Aksara*. 38(1). 1—23. doi: <http://dx.doi.org/10.29255/aksara.v38i1.4941.1-23>**PENDAHULUAN**

Bahasa merupakan sarana komunikasi utama yang memiliki peran fundamental dalam kehidupan manusia, tidak hanya sebagai alat penyampai informasi, tetapi juga sebagai medium untuk membangun relasi sosial, menegaskan identitas, serta merepresentasikan nilai-nilai budaya suatu Masyarakat (Riswandi et al., 2026). Dalam perspektif linguistik, bahasa tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berkaitan dengan konteks sosial yang melingkupinya (Sapiah et al., 2025). Suryawin et al. (2022) menyatakan bahwa penggunaan bahasa dipengaruhi oleh penutur, situasi, topik pembicaraan, serta sikap dan strategi berbahasa. Pandangan ini sejalan dengan Hasibuan et al.,(2026) yang menegaskan bahwa variasi bahasa muncul sebagai akibat dari keragaman sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, kajian sociolinguistik memandang bahasa sebagai praktik sosial yang dinamis, adaptif, dan kontekstual.

Dalam kerangka sociolinguistik, salah satu konsep penting adalah bilingualisme dan multilingualisme, yaitu kemampuan individu atau masyarakat menggunakan lebih dari satu bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Fajeri & Samsuri, (2024) menjelaskan bahwa bilingualisme bukan sekadar penguasaan dua bahasa, tetapi juga kemampuan memilih bahasa secara tepat sesuai dengan konteks sosial. Dalam masyarakat multilingual, pemilihan bahasa menjadi strategi komunikasi yang sangat penting, terutama ketika penutur berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Yunidar et al., (2025) melalui konsep *domain of language use* menegaskan bahwa pilihan bahasa sangat dipengaruhi oleh ranah sosial, seperti keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan ruang publik. Artinya, seseorang dapat menggunakan bahasa yang berbeda ketika berada dalam konteks yang berbeda.

Fenomena ini sangat terlihat dalam masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan, termasuk perbatasan antara Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Sulawesi Selatan (Sulsel). Secara kontekstual, wilayah ini merupakan ruang interaksi lintas budaya yang intens, di mana berbagai kelompok etnis seperti Bugis, Toraja, Pamona, dan Jawa hidup berdampingan. Dalam praktik sehari-hari, masyarakat menghadapi situasi komunikasi yang beragam. Misalnya, dalam aktivitas pasar tradisional, penjual dan pembeli sering memulai interaksi dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar umum, kemudian beralih ke bahasa daerah tertentu ketika mengetahui identitas etnis lawan bicara. Dalam lingkungan kerja, terutama yang berkaitan dengan institusi formal, bahasa Indonesia lebih dominan digunakan, sedangkan dalam interaksi informal antar rekan kerja, bahasa daerah menjadi pilihan utama. Sementara itu, dalam lingkungan keluarga, bahasa daerah masih berperan penting sebagai sarana pewarisan budaya, meskipun generasi muda mulai menunjukkan kecenderungan beralih ke bahasa Indonesia.

Dalam situasi seperti ini, muncul fenomena alih kode (*code-switching*) dan campur kode (*code-mixing*) sebagai bentuk strategi komunikasi. Inayah et al., (2024) menjelaskan bahwa alih kode terjadi ketika penutur berpindah dari satu bahasa ke bahasa lain sesuai dengan perubahan situasi, sedangkan campur kode terjadi ketika unsur-unsur bahasa yang berbeda digunakan dalam satu tuturan. Fenomena ini bukan sekadar gejala linguistik, tetapi juga mencerminkan kemampuan adaptasi sosial penutur. Adelia et al., (2026) menegaskan bahwa alih kode dan campur kode merupakan strategi untuk menyesuaikan diri dengan lawan bicara, meningkatkan

efektivitas komunikasi, serta membangun kedekatan sosial. Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena tersebut dalam berbagai konteks. Rudiatin, (2018) menemukan bahwa masyarakat di wilayah perbatasan Kalimantan Utara - Malaysia menggunakan alih kode sebagai strategi untuk menjembatani perbedaan bahasa sekaligus memperkuat hubungan sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi multilingual masyarakat perbatasan bersifat adaptif dan fungsional. Sementara itu, Navita et al., (2025) dalam studi tentang keluarga multibahasa menemukan bahwa bahasa Indonesia cenderung digunakan dalam konteks formal, sedangkan bahasa daerah digunakan dalam konteks emosional dan kultural. Hal ini menunjukkan adanya pembagian fungsi bahasa berdasarkan domain sosial. Resky (2026) menambahkan bahwa dalam masyarakat perkotaan multibahasa, campur kode bahkan menjadi bentuk komunikasi yang dominan karena dianggap lebih fleksibel dan ekspresif.

Jika disintesis, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan beberapa kecenderungan utama. Pertama, penggunaan bahasa dalam masyarakat multilingual bersifat kontekstual dan sangat dipengaruhi oleh domain sosial. Kedua, alih kode dan campur kode merupakan strategi komunikasi yang umum digunakan untuk mencapai efektivitas interaksi dan membangun relasi sosial. Ketiga, penggunaan bahasa juga berkaitan dengan identitas sosial, prestise, dan relasi kekuasaan. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan karena cenderung berfokus pada satu konteks tertentu, seperti lingkungan pendidikan, keluarga, atau komunitas tertentu, tanpa mengkaji secara komprehensif penggunaan bahasa dalam berbagai domain sosial secara terpadu.

Selain itu, penelitian-penelitian tersebut umumnya belum secara spesifik mengkaji wilayah perbatasan Sulteng-Sulsel, yang memiliki karakteristik unik sebagai ruang pertemuan berbagai budaya dan bahasa dengan intensitas interaksi yang tinggi. Padahal, konteks perbatasan memiliki dinamika yang berbeda dibandingkan dengan wilayah non-perbatasan, terutama dalam hal mobilitas sosial, interaksi ekonomi, dan negosiasi identitas budaya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan penelitian (*research gap*), yaitu kurangnya kajian yang secara komprehensif menganalisis pola penggunaan bahasa dalam komunikasi lintas budaya dengan mengintegrasikan berbagai domain sosial (keluarga, pekerjaan, dan ruang publik) serta faktor-faktor yang memengaruhinya di wilayah perbatasan Sulteng-Sulsel. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan pendekatan yang lebih holistik. Adapun kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini mengkaji penggunaan bahasa secara lintas domain dalam satu kerangka analisis yang terintegrasi. Kedua, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena kebahasaan, tetapi juga menganalisis faktor-faktor yang memengaruhinya, seperti faktor sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan teknologi. Ketiga, penelitian ini berfokus pada wilayah perbatasan Sulteng-Sulsel yang masih relatif jarang dikaji dalam penelitian sosiolinguistik, sehingga memberikan kontribusi empiris baru.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pola penggunaan bahasa dalam komunikasi lintas budaya pada masyarakat perbatasan Sulteng-Sulsel? dan (2) faktor-faktor apa saja yang memengaruhi penggunaan bahasa dalam komunikasi lintas budaya di wilayah tersebut. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan pola penggunaan bahasa dalam komunikasi lintas budaya pada masyarakat perbatasan Sulteng-Sulsel, dan (2) menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan bahasa dalam konteks tersebut. Penelitian ini memiliki urgensi yang penting baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian sosiolinguistik, khususnya dalam memahami praktik kebahasaan masyarakat multibahasa di wilayah perbatasan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam pengembangan kebijakan bahasa, pendidikan multibahasa, serta pelestarian bahasa daerah. Selain itu, pemahaman terhadap pola komunikasi lintas budaya juga

penting untuk menjaga kohesi sosial dan meminimalkan potensi konflik komunikasi dalam masyarakat yang heterogen.

Kajian penggunaan bahasa dalam masyarakat multibahasa tidak dapat dilepaskan dari perspektif sosiolinguistik yang memandang bahasa sebagai praktik sosial. Syamsurijal, (2023) melalui konsep *domain of language use* menjelaskan bahwa pemilihan bahasa bergantung pada ranah sosial seperti keluarga, pekerjaan, dan ruang publik. Hal ini diperkuat oleh konsep bilingualisme (Dani, 2025), yang menekankan kemampuan penutur menggunakan lebih dari satu bahasa secara fleksibel sesuai kebutuhan komunikasi. Dalam praktiknya, fleksibilitas tersebut tampak melalui alih kode dan campur kode yang menjadi fenomena umum dalam masyarakat multilingual (Mu'in, 2025).

Alih kode dan campur kode tidak hanya mencerminkan kemampuan linguistik, tetapi juga strategi sosial untuk menyesuaikan diri, membangun kedekatan, dan menegaskan identitas (Furqan & Hartono, 2025). Teori akomodasi komunikasi (Giles) menjelaskan bahwa penutur menyesuaikan bahasa untuk mencapai tujuan sosial tertentu, sementara Bourdieu menekankan bahwa bahasa memiliki nilai simbolik terkait kekuasaan dan status. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahasa bersifat adaptif dan kontekstual, dipengaruhi oleh domain, tujuan komunikasi, dan identitas penutur (Kusumanegara, 2024). Namun, kajian yang mengintegrasikan berbagai domain dalam konteks wilayah perbatasan Sulteng–Sulsel masih terbatas, sehingga penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika penggunaan bahasa dalam komunikasi lintas budaya.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena penggunaan bahasa dalam komunikasi lintas budaya pada masyarakat perbatasan Sulteng-Sulsel dalam konteks yang alami. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis pola penggunaan bahasa serta faktor-faktor yang memengaruhinya berdasarkan realitas yang terjadi di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah perbatasan antara Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, khususnya di Desa Mayo dan sekitarnya yang memiliki karakteristik masyarakat multietnis, seperti Bugis, Toraja, Pamona, dan Jawa. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingginya intensitas interaksi lintas budaya yang memungkinkan terjadinya variasi penggunaan bahasa. Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan, yaitu pada Januari hingga Februari 2026.

Data dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang mencakup tuturan lisan, hasil wawancara, serta hasil observasi terkait penggunaan bahasa dalam berbagai konteks komunikasi. Sumber data utama adalah informan yang merupakan masyarakat setempat yang terlibat dalam interaksi lintas budaya, serta peristiwa komunikasi yang terjadi di lingkungan keluarga, tempat kerja, dan ruang publik seperti pasar. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 12 orang yang terdiri dari berbagai latar belakang etnis, yaitu Bugis, Pamona, Toraja, dan Jawa, dengan mempertimbangkan variasi usia, pekerjaan, dan pengalaman sosial. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan kriteria tertentu seperti telah menetap minimal lima tahun di wilayah perbatasan, aktif dalam interaksi lintas budaya, dan menguasai lebih dari satu bahasa. Selain itu, teknik ini dikembangkan dengan *snowball sampling* untuk memperoleh informan tambahan berdasarkan rekomendasi dari informan sebelumnya.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai *human instrument* yang berperan dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Untuk mendukung proses pengumpulan data, digunakan instrumen tambahan berupa pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi, alat perekam audio, dan buku catatan lapangan. Pedoman

wawancara digunakan untuk menggali informasi secara mendalam terkait pola penggunaan bahasa dan faktor-faktor yang memengaruhinya, namun tetap memberikan fleksibilitas dalam proses wawancara. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi partisipatif dilakukan dengan mengamati secara langsung interaksi masyarakat dalam berbagai situasi komunikasi selama periode penelitian, seperti di pasar, lingkungan kerja, dan keluarga. Wawancara mendalam dilakukan kepada seluruh informan dengan durasi sekitar 30 hingga 60 menit, direkam menggunakan alat perekam, kemudian ditranskripsikan untuk keperluan analisis. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan catatan lapangan, hasil rekaman, serta data pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijamin melalui beberapa teknik, yaitu triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, triangulasi teknik dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta member check dengan mengonfirmasi kembali data kepada informan. Selain itu, peneliti juga melakukan ketekunan pengamatan dengan cara melakukan observasi secara berulang untuk memperoleh data yang konsisten dan mendalam. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2014), yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman terhadap pola penggunaan bahasa. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara bertahap dan terus-menerus selama proses penelitian berlangsung untuk memperoleh temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Penggunaan Bahasa dalam Komunikasi Lintas Budaya***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah perbatasan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan memiliki pola penggunaan bahasa yang bersifat multilingual, dinamis, dan kontekstual. Masyarakat di wilayah ini terdiri atas beberapa kelompok etnis utama, yaitu Bugis dan Pamona (Bare'e), serta kelompok minoritas seperti Toraja dan Jawa. Komposisi etnis yang beragam ini menciptakan situasi kebahasaan yang kompleks, di mana interaksi sosial berlangsung secara lintas budaya dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara terhadap 12 informan, sebanyak 83% informan (10 orang) menyatakan bahwa mereka menggunakan lebih dari satu bahasa dalam aktivitas sehari-hari. Bahkan, sekitar 58% informan (7 orang) mengaku secara aktif menggunakan tiga bahasa atau lebih (bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa daerah lain). Data ini menunjukkan bahwa kompetensi multilingual bukan sekadar kemampuan tambahan, melainkan telah menjadi kebutuhan komunikatif dalam masyarakat perbatasan.

Dalam konteks sosial, intensitas interaksi antar-etnis yang tinggi baik dalam aktivitas ekonomi, hubungan sosial, maupun kekerabatan mendorong masyarakat untuk melakukan penyesuaian bahasa secara terus-menerus. Hal ini sejalan dengan konsep domain *of language use* yang dikemukakan oleh Fishman dalam Suharti, (2021) bahwa pemilihan bahasa tidak hanya bergantung pada kemampuan linguistik, tetapi juga dipengaruhi oleh situasi sosial, relasi antarpener, dan tujuan komunikasi. Dengan demikian, bahasa dalam masyarakat perbatasan tidak digunakan secara tetap, melainkan berubah secara situasional.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan adanya pola distribusi fungsi bahasa yang cukup jelas. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai lingua franca yang digunakan dalam komunikasi antar-etnis, terutama dalam situasi formal dan semi-formal. Sekitar 75% interaksi lintas etnis (berdasarkan observasi lapangan di ruang publik dan tempat kerja) diawali dengan

penggunaan bahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki posisi strategis sebagai bahasa netral yang menjamin keterpahaman bersama. Namun demikian, penggunaan bahasa Indonesia tidak bersifat dominan secara absolut. Dalam banyak kasus, bahasa Indonesia hanya digunakan sebagai bahasa awal interaksi, kemudian diikuti dengan peralihan ke bahasa daerah ketika penutur menemukan kesamaan latar belakang budaya. Fenomena ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa bersifat adaptif dan negosiatif, bukan statis.

Di sisi lain, bahasa daerah seperti Bugis dan Bare'e tetap memiliki posisi yang kuat, terutama dalam konteks informal. Bahasa daerah digunakan untuk mengekspresikan identitas, membangun kedekatan sosial, serta memperkuat solidaritas kelompok. Sekitar 68% interaksi informal (berdasarkan observasi di keluarga dan pasar) menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa utama. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat dominasi bahasa Indonesia dalam ranah formal, bahasa daerah tetap menjadi bahasa utama dalam kehidupan sosial sehari-hari. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa praktik alih kode (*code-switching*) dan campur kode (*code-mixing*) merupakan fenomena yang sangat dominan. Hampir seluruh informan mengaku sering melakukan alih kode dalam percakapan sehari-hari. Alih kode biasanya terjadi ketika terdapat perubahan situasi komunikasi, seperti dari formal ke informal, atau ketika penutur ingin menyesuaikan diri dengan lawan bicara (Inayah et al., 2024). Sementara itu, campur kode sering digunakan dalam situasi semi-formal, terutama ketika penutur menggabungkan istilah teknis bahasa Indonesia dengan struktur bahasa daerah (Andriani, 2024).

Fenomena ini menunjukkan bahwa batas antarbahasa dalam masyarakat perbatasan bersifat cair dan fleksibel, sebagaimana dijelaskan dalam kajian multilingualisme bahwa praktik kebahasaan tidak selalu mengikuti batas linguistik yang kaku, melainkan menyesuaikan kebutuhan komunikasi (Saptadi et al., 2024). Dengan demikian, penggunaan bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai strategi sosial untuk membangun relasi, menunjukkan identitas, dan mencapai tujuan interaksi. Secara analitis, temuan ini mengindikasikan bahwa pola penggunaan bahasa dalam komunikasi lintas budaya di wilayah perbatasan Sulteng–Sulsel ditentukan oleh tiga kecenderungan utama. Pertama, adanya pembagian fungsi bahasa berdasarkan konteks, yaitu bahasa Indonesia untuk ranah formal dan bahasa daerah untuk ranah informal. Kedua, adanya fleksibilitas linguistik melalui praktik alih kode dan campur kode. Ketiga, adanya pengaruh faktor sosial, seperti latar belakang etnis, relasi sosial, dan tujuan komunikasi dalam menentukan pilihan bahasa. Dengan demikian, penggunaan bahasa dalam masyarakat perbatasan tidak dapat dipahami secara tunggal, melainkan sebagai praktik sosial yang bersifat dinamis dan adaptif. Bahasa menjadi sarana utama dalam menjembatani perbedaan budaya sekaligus mempertahankan identitas etnis dalam interaksi sehari-hari.

### ***Penggunaan Bahasa di Tempat Kerja***

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap 12 informan, yang terdiri atas petani, pedagang, aparat desa, dan pekerja informal lainnya, diperoleh sebanyak 47 tuturan yang dianalisis dalam konteks penggunaan bahasa di tempat kerja di Desa Mayo. Seluruh data kemudian diklasifikasikan berdasarkan situasi komunikasi (formal, informal, dan semi-formal) serta jenis bahasa yang digunakan (bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan campur kode). Untuk memudahkan analisis, data diberi kode sebagai berikut: DK (Data Kerja), FORM (formal), INF (informal), SF (semi-formal), BI (Bahasa Indonesia), BD (Bahasa Daerah), dan CK (Campur Kode).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahasa di tempat kerja bersifat multifungsi, dinamis, dan kontekstual, di mana penutur secara aktif menyesuaikan pilihan

bahasa berdasarkan relasi sosial, tujuan komunikasi, serta situasi interaksi. Secara kuantitatif, dari 47 tuturan yang dianalisis, terdapat 21 tuturan (45%) menggunakan bahasa Indonesia dalam situasi formal, 18 tuturan (38%) menggunakan bahasa daerah dalam situasi informal, dan 8 tuturan (17%) berupa campur kode dalam situasi semi-formal.

Dalam situasi formal, bahasa Indonesia digunakan secara dominan, terutama dalam interaksi yang melibatkan struktur kelembagaan dan hubungan hierarkis, seperti rapat desa, musyawarah kelompok tani, serta kegiatan administrasi. Hal ini terlihat pada data berikut:

[DK01/FORM/BI]

*"Bantuan ini akan dibagikan sesuai dengan data yang telah diverifikasi."*

Tuturan ini menunjukkan penggunaan bahasa Indonesia ragam resmi yang ditandai dengan struktur kalimat baku, pilihan leksikon administratif, serta nada yang bersifat instruktif. Secara analitis, penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol otoritas dan legitimasi kelembagaan. Bahasa Indonesia diposisikan sebagai bahasa yang memiliki nilai prestise tinggi (Bourdieu, 1991), sehingga penggunaannya memperkuat posisi sosial aparat desa sebagai representasi institusi formal. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia dalam situasi formal juga mencerminkan adanya jarak sosial dan hierarki. Hal ini terlihat dalam tuturan berikut:

[DK02/FORM/BI]

*"Mohon kerja samanya untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan."*

Tuturan ini merupakan bentuk tindak tutur direktif tidak langsung yang menggunakan strategi kesantunan untuk mempertahankan otoritas tanpa menimbulkan kesan memaksa. Dengan demikian, bahasa Indonesia dalam konteks formal berfungsi sebagai alat kontrol sosial sekaligus penanda struktur kekuasaan. Sebaliknya, dalam situasi kerja yang bersifat informal, bahasa daerah lebih dominan digunakan, terutama ketika interaksi terjadi antarpenerutan dengan latar budaya yang sama. Contoh penggunaan bahasa daerah dapat dilihat pada data berikut:

[DK03/INF/BD-BG]

*"Ayo' cepatki maggalung, narekko teppaja' hujan."*

Tuturan ini menunjukkan penggunaan bahasa Bugis dalam konteks kerja lapangan. Secara fungsional, bahasa daerah digunakan karena lebih efisien, langsung, dan kontekstual, serta mampu menciptakan suasana kerja yang akrab. Penggunaan partikel *-ki* juga menunjukkan tingkat kesantunan sekaligus kedekatan sosial antarpenerutan.

Hal serupa juga ditemukan pada tuturan berikut:

[DK04/INF/BD-BG]

*"Iyye, narekko malessi'mo, istirahatki dulu."*

Tuturan ini mencerminkan fungsi bahasa daerah sebagai sarana untuk menyampaikan empati dan solidaritas. Dalam konteks ini, bahasa daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai media ekspresi nilai sosial, seperti kepedulian dan kebersamaan.

Dalam interaksi antarpenerutan Bare'e, ditemukan pola yang sama:

[DK05/INF/BD-BR]

*"Marope kita mombangu, supaya cepat rampung."*

Penggunaan bahasa Bare'e dalam tuturan ini menegaskan bahwa bahasa daerah berperan sebagai penanda identitas kolektif dan solidaritas kelompok, terutama dalam aktivitas kerja bersama. Selain penggunaan bahasa tunggal, penelitian ini juga menemukan praktik alih kode dan campur kode yang cukup signifikan, terutama dalam situasi semi-formal. Contohnya:

[DK06/SF/CK]

*"Datata sudah lengkapmi, tinggal diverifikasi saja."*

Tuturan ini menunjukkan campur kode antara bahasa Indonesia dan bahasa Bugis. Secara analitis, fenomena ini mencerminkan strategi komunikasi adaptif, di mana penutur menggabungkan kejelasan istilah teknis bahasa Indonesia dengan nuansa kedekatan sosial dari bahasa daerah. Campur kode dalam konteks ini berfungsi sebagai jembatan antara ranah formal dan informal. Fenomena lain yang menarik adalah fleksibilitas penggunaan bahasa Indonesia dalam bentuk nonbaku dalam situasi semi-formal, seperti pada data berikut:

[DK07/SF/BI-NB]

*"Kita atur sama-sama saja, yang penting selesai hari ini."*

Tuturan ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia tidak selalu digunakan dalam bentuk formal, tetapi dapat disesuaikan untuk membangun suasana kerja yang lebih egaliter. Hal ini menegaskan bahwa batas antara bahasa formal dan informal bersifat cair dan kontekstual, tergantung pada tujuan komunikasi dan relasi sosial.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa di tempat kerja di Desa Mayoa tidak hanya ditentukan oleh faktor linguistik, tetapi juga oleh faktor sosial, budaya, dan struktural. Terdapat pembagian fungsi bahasa yang relatif jelas, di mana bahasa Indonesia digunakan dalam ranah formal dan institusional, sedangkan bahasa daerah digunakan dalam ranah informal dan interpersonal. Namun demikian, pembagian ini tidak bersifat kaku, karena adanya praktik alih kode dan campur kode yang menunjukkan fleksibilitas dan kompetensi multilingual masyarakat. Dengan demikian, bahasa di tempat kerja tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana negosiasi identitas, relasi kekuasaan, dan solidaritas sosial. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa masyarakat perbatasan memiliki kemampuan adaptif yang tinggi dalam mengelola keberagaman bahasa, sehingga mampu menciptakan komunikasi lintas budaya yang efektif dan harmonis.

### ***Penggunaan Bahasa di Lingkungan Keluarga***

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap 10 keluarga (15 informan) di Desa Mayoa, diperoleh sebanyak 42 tuturan yang dianalisis dalam konteks penggunaan bahasa di lingkungan keluarga. Data kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis bahasa dan situasi penggunaan, dengan sistem kode sebagai berikut: DKL (Data Keluarga), INF (informal), SF (semi-formal), BD (bahasa daerah), BI (bahasa Indonesia), dan CK (campur kode).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahasa di lingkungan keluarga memiliki pola yang berbeda dibandingkan dengan penggunaan bahasa di tempat kerja. Dalam ranah keluarga, pemilihan bahasa sangat dipengaruhi oleh kedekatan emosional, hubungan kekerabatan, usia anggota keluarga, serta latar belakang budaya suami dan istri. Bahasa dalam lingkungan keluarga tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi sehari-hari, tetapi juga sebagai sarana pewarisan nilai budaya, identitas etnis, dan norma sosial kepada generasi berikutnya.

Secara kuantitatif, dari 42 tuturan yang dianalisis, ditemukan bahwa bahasa daerah mendominasi sebesar 24 tuturan (57%), campur kode sebanyak 12 tuturan (29%), dan bahasa Indonesia murni hanya 6 tuturan (14%). Temuan ini menunjukkan bahwa ranah keluarga masih menjadi domain utama penggunaan bahasa daerah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa bahasa daerah cenderung menjadi bahasa utama dalam komunikasi keluarga, terutama dalam interaksi antara orang tua dengan anak, suami dengan istri, serta antar anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Bahasa Bugis dan bahasa Bare'e digunakan karena dianggap lebih ekspresif, hangat, dan mencerminkan rasa kekeluargaan. Salah satu informan menyatakan

bahwa berbicara dengan anak menggunakan bahasa daerah terasa lebih alami dan mampu menyampaikan emosi dengan lebih tepat dibandingkan bahasa Indonesia.

Dalam keluarga berlatar budaya Bugis, bahasa Bugis digunakan secara dominan dalam komunikasi sehari-hari. Misalnya, seorang ibu menegur anaknya dengan ungkapan:

[DKL01/INF/BD-BG]

*“Aja’ macappa-cappa, makkutana dulu”*

Tuturan ini menegaskan bahwa bahasa daerah digunakan secara efektif untuk menyampaikan nasihat, larangan, dan nilai sosial dalam konteks informal. Bahasa Bugis berfungsi sebagai medium yang tepat untuk menanamkan norma perilaku secara halus dan tidak menggurui, sehingga memperkuat solidaritas dan kedekatan sosial antara penutur dan mitra tutur. Ungkapan lain seperti:

[DKL02/INF/BD-BG]

*“Iyye nak, sibawa ’ko lao sekolah”*

Penggunaan bahasa Bugis dalam konteks ini tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga menanamkan nilai kesopanan, kepatuhan, dan kedekatan emosional antara orang tua dan anak. Bahasa Bugis juga digunakan dalam komunikasi antara suami dan istri, misalnya:

[DKL03/INF/BD-BG]

*“Apa ’ta mabbulo sibawa anak-anak?”*

Data ini memperkuat temuan bahwa bahasa Bugis digunakan secara dominan dalam ranah informal dan komunal. Bahasa daerah berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keakraban, memperlancar interaksi sosial, serta mempertahankan identitas budaya masyarakat setempat. Sementara itu, dalam keluarga berlatar budaya Bare’e, bahasa Bare’e juga digunakan secara aktif dalam komunikasi domestik. Contohnya:

[DKL04/INF/BD-BR]

*“Marope mo kita mange, anak-anak so lapar”*

Tuturan ini memperlihatkan bahwa bahasa daerah berperan penting dalam menyampaikan nilai empati, solidaritas, dan keakraban, yang sulit tergantikan oleh bahasa resmi. Ungkapan lain seperti:

[DKL05/SF/CK]

*“Aja’ ko lupa belajar, supaya jadi orang baik”*

Data ini menunjukkan bahwa bahasa daerah dan bahasa Indonesia dapat bersinergi dalam menyampaikan pesan pendidikan dan nilai karakter. Bahasa Bugis digunakan untuk membangun kedekatan emosional dan otoritas orang tua, sementara bahasa Indonesia dipakai untuk menegaskan konsep abstrak. Dengan demikian, campur kode berfungsi sebagai strategi efektif dalam proses sosialisasi nilai dan pembentukan karakter anak.

Dalam keluarga yang memiliki latar belakang budaya campuran, misalnya suami Bugis dan istri Pamona, ditemukan praktik bilingualisme dalam komunikasi keluarga. Bahasa Bugis dan Pamona digunakan secara bergantian, tergantung pada lawan tutur dan situasi komunikasi. Namun demikian, bahasa Indonesia juga sering digunakan sebagai bahasa penghubung, terutama ketika anggota keluarga memiliki tingkat penguasaan bahasa daerah yang berbeda.

Fenomena alih kode dan campur kode juga banyak ditemukan dalam lingkungan keluarga. Misalnya:

[DKL06/SF/CK]

*“Aja’ ko malas belajar, nanti susah di sekolah”*

[DKL07/SF/CK]

*“Marope cepat mandi, sudah mau berangkat sekolah”*

Kedua data ini memperlihatkan bahwa campur kode digunakan secara fungsional untuk menyampaikan nasihat tanpa menghilangkan keakraban. Bahasa daerah berfungsi membangun relasi emosional, sementara bahasa Indonesia memperjelas makna yang berkaitan dengan konteks pendidikan formal.

Temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan penggunaan bahasa berdasarkan generasi, yang mengarah pada fenomena pergeseran bahasa (*language shift*). Berdasarkan data, generasi tua (orang tua dan kakek-nenek) menggunakan bahasa daerah secara dominan dalam sekitar 80% tuturan, sedangkan generasi muda (anak dan remaja) hanya menggunakan bahasa daerah dalam sekitar 35-40% tuturan, dan lebih sering menggunakan bahasa Indonesia atau campur kode.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar anak-anak masih memahami bahasa daerah secara pasif, tetapi tidak selalu mampu menggunakannya secara aktif dalam percakapan sehari-hari. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan penurunan kompetensi produktif bahasa daerah pada generasi muda. Faktor utama yang memengaruhi kondisi ini adalah lingkungan pendidikan formal yang menggunakan bahasa Indonesia, pengaruh media digital, serta interaksi sosial di luar rumah yang lebih banyak menggunakan bahasa nasional. Meskipun demikian, bahasa daerah masih memiliki posisi simbolik yang kuat sebagai identitas keluarga. Orang tua yang secara konsisten menggunakan bahasa daerah berperan penting dalam menjaga keberlangsungan bahasa tersebut. Namun, jika pola ini tidak dipertahankan, terdapat potensi terjadinya pergeseran bahasa secara lebih luas di masa mendatang.

Secara keseluruhan, penggunaan bahasa di lingkungan keluarga di Desa Mayoa mencerminkan hubungan yang erat antara bahasa, budaya, dan kehidupan sosial masyarakat perbatasan. Bahasa daerah berfungsi sebagai bahasa keintiman, pendidikan nilai, dan identitas budaya, sementara bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa penghubung dan adaptasi terhadap pengaruh eksternal. Praktik *bilingualisme*, alih kode, dan campur kode menunjukkan bahwa keluarga di Desa Mayoa memiliki kompetensi linguistik yang adaptif. Dengan demikian, lingkungan keluarga menjadi ruang utama dalam membentuk kemampuan komunikasi lintas budaya sekaligus arena krusial dalam mempertahankan atau justru menggeser keberlangsungan bahasa daerah.

### ***Penggunaan Bahasa di Tempat Umum***

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap 11 informan (penjual dan pembeli) di ruang publik Desa Mayoa, khususnya di pasar, diperoleh sebanyak 45 tuturan yang dianalisis. Data kemudian diklasifikasikan menggunakan sistem kode sebagai berikut: DPU (Data Publik Umum), INF (informal), SF (semi-formal), BI (Bahasa Indonesia), BD (Bahasa Daerah), dan CK (Campur Kode).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahasa di tempat umum memiliki pola kebahasaan yang paling variatif dan fleksibel dibandingkan lingkungan keluarga dan tempat kerja. Hal ini disebabkan oleh karakter pasar sebagai ruang sosial terbuka yang mempertemukan individu dengan latar belakang budaya, usia, dan kepentingan ekonomi yang beragam. Oleh karena itu, pemilihan bahasa sangat dipengaruhi oleh tujuan komunikasi (transaksi), relasi sosial, serta strategi pragmatis untuk mencapai kesepakatan ekonomi.

Secara kuantitatif, dari 45 tuturan yang dianalisis, ditemukan bahwa bahasa Indonesia digunakan dalam 18 tuturan (40%), terutama sebagai bahasa awal interaksi; bahasa daerah dalam 15 tuturan (33%), khususnya pada relasi akrab; dan campur kode dalam 12 tuturan (27%), yang dominan dalam situasi negosiasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa bahasa Indonesia sering digunakan sebagai bahasa pembuka interaksi, terutama ketika penjual dan pembeli belum saling mengenal atau berasal dari latar budaya yang berbeda. Contohnya:

[DPU01/INF/BI]

*"Ini berapa harganya?"*

[DPU02/INF/BI]

*"Bisa kurang sedikit?"*

Tuturan ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa netral dan aman dalam memulai komunikasi. Secara analitis, penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks ini berfungsi sebagai strategi reduksi risiko komunikasi, yaitu untuk menghindari kesalahpahaman dalam interaksi awal. Selain itu, ragam santai yang digunakan menunjukkan bahwa dalam ranah ekonomi informal, efektivitas komunikasi lebih diutamakan daripada formalitas linguistik. Namun, ketika penjual dan pembeli berasal dari latar budaya yang sama atau telah memiliki hubungan sosial sebelumnya, bahasa daerah menjadi lebih dominan. Misalnya:

[DPU03/INF/BD-BG]

*"Iye', iya'ni hargana, narekko tapolei, kurangngi' sedikit"*

Tuturan ini menunjukkan bahwa bahasa Bugis digunakan untuk membangun kedekatan sosial dan kepercayaan, yang merupakan faktor penting dalam keberhasilan transaksi. Dalam konteks ini, bahasa daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai modal sosial (social capital) yang memperkuat relasi ekonomi. Dalam interaksi antarpenerut Bare'e, ditemukan pola serupa:

[DPU04/INF/BD-BR]

*"Sangkuja se'i?"*

[DPU05/INF/BD-BR]

*"Tambahi mo sedikit, kita langganan"*

Penggunaan bahasa daerah dalam tuturan ini menunjukkan fungsi pragmatis sebagai alat persuasi dan negosiasi. Ungkapan "kita langganan" mengandung strategi retorik yang menekankan hubungan jangka panjang untuk mendapatkan keuntungan harga. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa daerah memiliki kekuatan dalam membangun relasi interpersonal yang berdampak langsung pada transaksi ekonomi. Selain penggunaan bahasa tunggal, praktik alih kode dan campur kode sangat dominan dalam interaksi pasar. Fenomena ini terutama muncul dalam proses negosiasi harga dan pertukaran informasi. Contohnya:

[DPU06/SF/CK]

*"Ini ikannya segar?"*

[DPU07/SF/CK]

*"Iyye', masih segar mo pi itu"*

Tuturan ini menunjukkan adanya pergeseran dari bahasa Indonesia ke bahasa Bugis dalam satu rangkaian interaksi. Secara analitis, alih kode ini berfungsi sebagai strategi konvergensi sosial, yaitu upaya penutur untuk mendekati diri dengan lawan tutur setelah mengidentifikasi kesamaan latar budaya. Campur kode juga terlihat dalam tuturan berikut:

[DPU08/SF/CK]

*"Sayurnya masih baru, dipetik pagi mo"*

Tuturan ini menunjukkan kombinasi bahasa Indonesia dan bahasa daerah dalam satu struktur kalimat. Secara fungsional, campur kode digunakan untuk menggabungkan kejelasan informasi (bahasa Indonesia) dengan kedekatan emosional (bahasa daerah). Hal ini menunjukkan bahwa penutur memiliki kompetensi multilingual yang memungkinkan mereka memilih unsur bahasa secara strategis. Selain itu, penggunaan bahasa di pasar juga mencerminkan relasi sosial dan posisi tawar. Bahasa Indonesia cenderung digunakan ketika terdapat jarak sosial atau hubungan yang belum akrab, sedangkan bahasa daerah digunakan

untuk memperkuat solidaritas. Penjual sering kali secara sadar beralih ke bahasa daerah untuk menarik simpati pembeli, yang menunjukkan bahwa bahasa digunakan sebagai strategi ekonomi.

Dengan demikian, bahasa dalam konteks pasar tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai: (1) strategi negosiasi harga, (2) alat membangun kepercayaan, (3) penanda identitas social, dan (4) instrumen adaptasi lintas budaya. Secara keseluruhan, penggunaan bahasa di tempat umum seperti pasar di Desa Mayoa mencerminkan karakter masyarakat perbatasan yang adaptif, strategis, dan komunikatif. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa penghubung yang netral, sementara bahasa Bugis dan Bare'e berfungsi sebagai bahasa keakraban dan identitas. Praktik alih kode dan campur kode menjadi strategi utama dalam menciptakan komunikasi yang efektif dan harmonis (Zahra et al., 2025). Temuan ini menegaskan bahwa pasar tidak hanya menjadi pusat aktivitas ekonomi, tetapi juga merupakan arena interaksi sosiolinguistik yang kompleks, di mana bahasa digunakan secara dinamis untuk menegosiasikan makna, relasi sosial, dan kepentingan ekonomi secara simultan.

Tabel 1. Distribusi Data Penggunaan Bahasa Berdasarkan Ranah

No	Ranah	Jumlah Data	Bahasa Indonesia (BI)	Bahasa Daerah (BD)	Campur Kode (CK)	Karakter Utama
1	Tempat Kerja	47	21 (45%)	18 (38%)	8 (17%)	Formal hierarkis, institusional
2	Lingkungan Keluarga	42	6 (14%)	24 (57%)	12 (29%)	Emosional, identitas, pewarisan budaya
3	Tempat Umum (Pasar)	45	18 (40%)	15 (33%)	12 (27%)	Negosiatif, fleksibel, adaptif
	Total	134	45 (34%)	57 (43%)	32 (23%)	

Berdasarkan tabel distribusi data, penggunaan bahasa pada masyarakat perbatasan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan memperlihatkan pola yang terstruktur sekaligus adaptif sesuai dengan ranah sosialnya. Dari keseluruhan data, bahasa daerah mendominasi, diikuti bahasa Indonesia dan praktik campur kode, yang menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kompetensi multilingual yang aktif. Pada ranah kerja, bahasa Indonesia cenderung dominan karena berfungsi sebagai bahasa formal, institusional, dan simbol legitimasi kekuasaan, terutama dalam interaksi yang melibatkan struktur hierarkis dan kepentingan administratif. Sebaliknya, pada ranah keluarga, bahasa daerah lebih dominan karena berkaitan erat dengan fungsi afektif, seperti membangun kedekatan emosional, mentransmisikan nilai budaya, serta mempertahankan identitas etnis. Sementara itu, pada ranah tempat umum seperti pasar, distribusi bahasa menjadi lebih seimbang dan fleksibel, karena penutur menyesuaikan pilihan bahasa dengan kebutuhan komunikasi yang bersifat praktis dan ekonomis. Pola ini menegaskan bahwa pemilihan bahasa tidak bersifat acak, melainkan dipengaruhi oleh konteks sosial, relasi antarpener, serta tujuan komunikasi yang ingin dicapai.

Secara teoretis, temuan ini sejalan dengan konsep *domain of language use* dari Fishman dalam Mu'in, (2025) yang menyatakan bahwa penggunaan bahasa ditentukan oleh ranah sosial tertentu, serta diperkuat oleh pandangan Bourdieu dalam Milal, (2021) mengenai bahasa sebagai modal simbolik yang berkaitan dengan kekuasaan dan legitimasi. Tingginya penggunaan campur kode juga mengindikasikan adanya kompetensi bilingual yang dinamis, sebagaimana dikemukakan oleh Rahmawati, (2025), bahwa penutur bilingual mampu mengombinasikan bahasa secara fleksibel dengan kebutuhan komunikasi. Selain itu, fenomena ini juga mendukung temuan Resky, (2026) bahwa dalam masyarakat multilingual, alih kode dan campur kode merupakan praktik yang wajar dan strategis. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, Rudi-atin (2018) hasil penelitian ini memperkuat bahwa ranah sosial sangat menentukan pilihan bahasa, namun sekaligus menunjukkan kebaruan bahwa pada konteks wilayah perbatasan, batas

antar ranah menjadi lebih cair dan saling beririsan. Dengan demikian, penggunaan bahasa dalam masyarakat Desa Mayoa tidak hanya merefleksikan sistem komunikasi, tetapi juga menjadi representasi dari negosiasi identitas, relasi sosial, dan adaptasi budaya dalam situasi multilingual yang kompleks.

### ***Faktor yang Mendukung Penggunaan Bahasa dalam Komunikasi Lintas Budaya pada Masyarakat Perbatasan antara Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan***

Fenomena komunikasi lintas budaya di wilayah perbatasan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang membentuk perilaku linguistik masyarakatnya. Penggunaan berbagai bahasa (Bahasa Indonesia, Bugis, dan Bare'e) secara dinamis menunjukkan adanya kekuatan sosial dan struktural yang mendorong terjadinya kontak bahasa yang harmonis. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, ditemukan bahwa terdapat enam faktor utama yang mendukung keberlangsungan penggunaan bahasa dalam komunikasi lintas budaya di wilayah perbatasan antara Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.

#### **1. Faktor Geografis dan Mobilitas Sosial**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, ditemukan bahwa faktor geografis dan mobilitas sosial merupakan salah satu faktor utama yang mendukung keberlangsungan penggunaan bahasa dalam komunikasi lintas budaya di wilayah perbatasan antara Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Letak geografis wilayah perbatasan tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap dinamika sosial, budaya, dan linguistik masyarakat setempat. Desa Mayoa, yang berada di kawasan ini, tidak hanya berfungsi sebagai batas administratif, tetapi juga sebagai ruang pertemuan berbagai kelompok etnis dengan latar belakang bahasa dan budaya yang berbeda.

Kedua kabupaten yang berbatasan langsung di wilayah ini dihubungkan oleh jalur darat yang relatif aktif dan berfungsi sebagai sarana utama mobilitas masyarakat. Jalur ini dimanfaatkan dalam berbagai aktivitas, seperti kegiatan ekonomi, pertanian, perdagangan, serta interaksi sosial sehari-hari. Keberadaan jalur darat yang strategis tersebut menjadikan wilayah perbatasan sebagai ruang transisi sosial yang dinamis. Masyarakat secara intensif menggunakan jalur ini untuk mendistribusikan hasil kebun, menjual komoditas pertanian, serta mengakses pusat-pusat ekonomi di wilayah tetangga. Akibatnya, intensitas pertemuan antarindividu dari berbagai etnis seperti Bugis, Bare'e, dan kelompok etnis lainnya menjadi sangat tinggi.

Mobilitas yang terjadi tidak hanya bersifat temporer, tetapi dalam banyak kasus juga bersifat menetap, misalnya melalui perpindahan tempat tinggal dan perkawinan antaretnis. Kondisi ini memperluas jaringan sosial lintas budaya sekaligus meningkatkan frekuensi interaksi antarpengguna bahasa yang berbeda. Dari perspektif sosiolinguistik, keterbukaan geografis ini berimplikasi langsung pada terbentuknya ruang komunikasi multibahasa. Masyarakat Desa Mayoa hidup dalam situasi yang menuntut kemampuan adaptasi linguistik yang tinggi, sehingga bahasa tidak lagi dipahami sebagai identitas tunggal yang statis, melainkan sebagai alat komunikasi yang fleksibel dan situasional.

Dalam praktik interaksi sehari-hari, penutur secara sadar memilih bahasa yang dianggap paling efektif untuk mencapai pemahaman bersama, baik menggunakan bahasa daerah maupun Bahasa Indonesia. Mobilitas sosial yang tinggi, terutama yang didorong oleh faktor ekonomi dan sosial, semakin memperkuat intensitas kontak bahasa di wilayah ini. Aktivitas perdagangan hasil bumi, seperti penjualan hasil kebun di pasar lintas wilayah, menjadi salah satu arena utama terjadinya kontak bahasa yang intensif.

Dalam situasi tersebut, penutur dituntut untuk menyesuaikan pilihan bahasa agar komunikasi dapat berlangsung secara efisien dan inklusif. Penyesuaian ini sering kali terwujud dalam bentuk alih kode (code-switching) dan campur kode (code-mixing) antara bahasa Bugis, bahasa

Bare'e, dan Bahasa Indonesia. Fenomena ini tercermin dalam penuturan salah satu informan dari Desa Mayoa yang menyatakan:

*"Setiap minggu kami jual hasil kebun. Di sana banyak orang Bare'e, jadi kami biasa bicara campur, kadang Bugis, kadang Indonesia, supaya semua paham." (Wawancara, 2025)*

Penjual hasil kebun dari etnis Bugis di pasar lintas wilayah:

*"Iye', tessalai pole kebun. Narekko taelo, maddara'na pole ri kebun iyae." (21)*

Tuturan tersebut menunjukkan bahwa bahasa Bugis tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai penanda identitas etnis sekaligus sarana membangun solidaritas ketika berinteraksi dengan sesama penutur Bugis atau mitra tutur yang memahami bahasa tersebut.

Sementara itu, dalam interaksi antara penutur Pamona dengan pembeli di pasar, ditemukan penggunaan bahasa Pamona sebagai berikut:

*"Tabea, to walia? Bau mpeulu' tuha, ngkai pole ngata." (22)*

Penggunaan bahasa Pamona dalam konteks ini menunjukkan bahwa bahasa daerah berfungsi sebagai bahasa utama dalam transaksi ekonomi lokal yang mencerminkan kedekatan sosial dan konteks wilayah.

Data-data tersebut menunjukkan adanya kesadaran pragmatis dalam penggunaan bahasa. Penutur tidak terikat secara eksklusif pada satu bahasa, melainkan secara strategis memanfaatkan seluruh repertoar linguistik yang dimiliki untuk menjembatani perbedaan etnis dan bahasa. Dengan demikian, bahasa berfungsi sebagai sarana negosiasi sosial yang memungkinkan terjalinnya kerja sama ekonomi dan sosial antar kelompok.

Selain interaksi ekonomi, mobilitas sosial juga berlangsung dalam bentuk relasi sosial jangka panjang, seperti perkawinan antaretnis. Perkawinan ini memperluas jaringan sosial lintas bahasa dan memperkuat kebutuhan akan kompetensi bilingual dalam lingkup keluarga. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga multietnis cenderung terpapar lebih dari satu bahasa sejak usia dini, sehingga memperkaya repertoar linguistik mereka. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memengaruhi pola transmisi bahasa antargenerasi serta membentuk identitas linguistik yang lebih cair dan adaptif. Dengan demikian, faktor geografis dan mobilitas sosial di Desa Mayoa tidak hanya berperan sebagai latar fisik, tetapi juga sebagai kekuatan struktural yang secara aktif membentuk praktik kebahasaan masyarakat.

Secara keseluruhan, wilayah perbatasan ini menunjukkan bahwa bahasa berkembang dalam relasi yang erat dengan ruang, mobilitas, dan kebutuhan sosial penuturnya. Dinamika tersebut menegaskan bahwa variasi bahasa dan praktik bilingual di Desa Mayoa merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor geografis, ekonomi, sosial, dan budaya yang saling berkaitan dan saling memperkuat.

## 2. Faktor Sosial dan Budaya

Keberagaman sosial-budaya merupakan faktor fundamental yang menopang keberlangsungan komunikasi lintas budaya di wilayah perbatasan. Di Desa Mayoa, hubungan sosial antar-etnis tidak bersifat sporadis atau temporer, melainkan telah terbangun secara historis, intensif, dan berkelanjutan. Interaksi tersebut terjalin melalui berbagai bentuk relasi sosial, seperti perkawinan campuran, hubungan kekerabatan lintas etnis, serta partisipasi kolektif dalam kegiatan adat, keagamaan, dan sosial kemasyarakatan. Struktur sosial yang demikian menciptakan pola interaksi yang inklusif dan secara alami mendorong integrasi budaya, termasuk dalam praktik kebahasaan.

Salah satu mekanisme utama yang memperkuat integrasi tersebut adalah perkawinan campuran antar-etnis, khususnya antara Bugis dan Bare'e. Dalam perspektif sosiolinguistik, keluarga campuran berfungsi sebagai domain penting dalam transmisi bahasa (Marpaung et al., 2025), di mana bahasa tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai media pewarisan nilai budaya. Melalui ikatan perkawinan, batas-batas etnis menjadi lebih cair, sehingga bahasa tidak lagi diposisikan sebagai simbol pemisah, melainkan sebagai alat pemersatu dalam kehidupan keluarga. Dalam konteks ini, keluarga multietnis menjadi ruang mikro terbentuknya kompetensi bilingual bahkan multilingual, karena anak-anak terpapar lebih dari satu bahasa sejak dini.

Hal tersebut tercermin dalam pernyataan seorang tokoh masyarakat Desa Mayoa berikut:

*"Kami di sini sudah seperti keluarga. Ada yang menikah dengan Bugis, ada yang Bugis dengan Bare'e. Jadi di rumah bisa tiga bahasa dipakai. Anak-anak jadi bisa campur juga, tapi tetap sopan."*  
(Wawancara, 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa praktik multibahasa dalam keluarga tidak dipersepsikan sebagai ancaman terhadap identitas budaya, melainkan sebagai fenomena sosial yang normal dan adaptif. Bahasa berfungsi sebagai instrumen integrasi sosial yang memungkinkan anggota keluarga dari latar belakang etnis berbeda membangun komunikasi yang harmonis. Lebih jauh, praktik ini juga menjadi sarana internalisasi nilai-nilai multikultural seperti toleransi, penghormatan, dan kesadaran akan keberagaman.

Penggunaan bahasa dalam keluarga campuran juga memperlihatkan fungsi simbolik bahasa sebagai pembawa nilai budaya. Hal ini tampak pada tuturan berikut:

Orang tua Bugis menasihati anak dalam keluarga perkawinan campuran:

*"Nak, pakkita'i gau'na tau. Iyaro adat, tessala'na jaga siri' ta."* (23)

Tuturan ini menunjukkan bahwa bahasa Bugis digunakan untuk mentransmisikan nilai budaya seperti *siri'* (harga diri), yang memiliki muatan emosional dan kultural yang kuat. Dalam konteks ini, bahasa ibu memiliki fungsi afektif yang lebih dominan dibandingkan bahasa lain, karena lebih efektif dalam menyampaikan nilai-nilai normatif dan etika sosial.

Selain dalam ranah keluarga, integrasi sosial-budaya juga tampak dalam interaksi kolektif masyarakat, seperti pada kegiatan adat. Misalnya, dalam percakapan saat pesta pernikahan adat:

*"Tabea, iye' acara ini bagus sekali. Mosinggani kita semua sebagai keluarga."* (24)

Tuturan ini memperlihatkan praktik campur kode lintas bahasa (Pamona, Bugis, dan Bahasa Indonesia) yang berfungsi sebagai strategi komunikasi inklusif. Penggunaan beberapa bahasa secara bersamaan mencerminkan upaya membangun solidaritas lintas etnis sekaligus menunjukkan adanya kompetensi komunikatif yang tinggi dalam masyarakat. Fenomena ini sejalan dengan konsep akomodasi komunikasi (Maddimunri et al., 2025), di mana penutur menyesuaikan pilihan bahasa untuk menciptakan kedekatan sosial dan mengurangi jarak sosial.

Pemahaman terhadap norma sosial juga tercermin dalam pola distribusi bahasa berdasarkan konteks. Bahasa daerah cenderung digunakan dalam situasi yang menekankan kedekatan emosional, solidaritas etnis, serta penghormatan terhadap adat, sementara Bahasa Indonesia digunakan dalam konteks formal, publik, dan lintas etnis. Pola ini menunjukkan adanya pembagian fungsi bahasa (*functional distribution*) yang bersifat komplementer, sebagaimana dijelaskan dalam teori diglossia Kusumawati et al., (2025). Bahasa tidak bersaing, tetapi saling melengkapi sesuai domain penggunaannya.

Dalam skala yang lebih luas, keberagaman sosial-budaya juga terwujud dalam berbagai kegiatan kolektif masyarakat, seperti pesta panen, pernikahan adat, ritual keagamaan, dan musyawarah kampung. Kegiatan-kegiatan ini menjadi ruang sosial di mana berbagai bahasa digunakan secara berdampingan. Bahasa Bugis sering digunakan untuk menyampaikan

ungkapan adat atau simbol budaya, sementara Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar umum agar pesan dapat dipahami oleh seluruh peserta lintas etnis. Praktik ini menunjukkan adanya koeksistensi linguistik yang stabil, di mana setiap bahasa memiliki peran spesifik dalam struktur sosial masyarakat. Fenomena tersebut menegaskan bahwa keberagaman sosial-budaya di Desa Mayoa menghasilkan sistem komunikasi yang tidak hanya multibahasa, tetapi juga adaptif dan harmonis. Bahasa berfungsi sebagai medium integrasi sosial, negosiasi identitas, serta pemeliharaan kohesi sosial. Dengan demikian, komunikasi lintas budaya di wilayah ini tidak terjadi karena hilangnya perbedaan, melainkan karena adanya kemampuan kolektif masyarakat dalam mengelola perbedaan tersebut secara konstruktif melalui praktik kebahasaan yang kontekstual, fleksibel, dan bermakna.

### 3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu pendorong utama terjadinya komunikasi lintas budaya di wilayah perbatasan. Di Desa Mayoa dan kawasan sekitarnya, aktivitas ekonomi masyarakat berlangsung dalam spektrum yang luas, meliputi perdagangan hasil kebun seperti kakao, kelapa, dan cengkeh, sektor pertanian dan perikanan, hingga jasa transportasi antarwilayah. Keragaman aktivitas ekonomi ini tidak hanya mencerminkan dinamika produksi lokal, tetapi juga menuntut intensitas interaksi sosial yang tinggi antarindividu dari latar belakang etnis dan bahasa yang berbeda. Dengan demikian, aktivitas ekonomi berfungsi sebagai katalis utama terbentuknya ruang komunikasi multibahasa yang bersifat praktis dan berorientasi tujuan.

Pasar-pasar tradisional di kawasan perbatasan, khususnya Pasar Mayoa, menjadi ruang sosial yang paling representatif dalam memperlihatkan dinamika komunikasi lintas budaya. Pasar tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai arena pertemuan sosial lintas etnis yang berlangsung secara rutin dan berulang. Dalam perspektif sosiolinguistik, pasar dapat dipahami sebagai domain interaksi ekonomi (*economic domain*) yang mempertemukan berbagai kelompok bahasa dalam situasi komunikasi yang menuntut efisiensi, kejelasan, dan keberhasilan negosiasi. Di ruang ini, pedagang dan pembeli dari berbagai kelompok etnis seperti Bugis, Bare'e, dan pendatang Jawa berinteraksi secara langsung dengan tujuan utama mencapai kesepakatan dan kelancaran transaksi.

Dalam konteks tersebut, penggunaan bahasa campuran tampak sebagai strategi komunikasi yang paling dinamis dan adaptif. Bahasa Indonesia umumnya berfungsi sebagai kerangka utama komunikasi karena sifatnya yang netral dan dapat dipahami secara luas, sementara kosakata dari bahasa Bugis dan Bare'e disisipkan secara selektif sesuai dengan latar belakang mitra tutur. Praktik ini menunjukkan adanya kesadaran linguistik pragmatis, di mana pilihan bahasa tidak didasarkan pada loyalitas identitas semata, tetapi pada pertimbangan efektivitas komunikasi dan keberhasilan transaksi ekonomi.

Hal ini tercermin dalam pernyataan seorang pedagang perempuan di Pasar Mayoa sebagai berikut:

*"Kalau jualan, saya lihat dulu pembelinya. Kalau orang Bugis, saya pakai Bugis. Tapi kalau dia orang Bare'e, saya campur Bugis sama Indonesia biar jelas. Pokoknya yang penting dagangan laku." (Wawancara, 2025)*

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa bahasa dalam konteks ekonomi diperlakukan sebagai alat strategis yang fleksibel, bukan sebagai simbol identitas yang kaku. Penutur secara aktif melakukan penyesuaian linguistik (*linguistic accommodation*) berdasarkan karakteristik lawan tutur. Strategi ini bertujuan untuk membangun kepercayaan (*trust*), mengurangi jarak sosial, serta meningkatkan efektivitas negosiasi. Praktik tersebut juga tampak dalam penggunaan bahasa Bugis pada interaksi ekonomi antarpemututur yang memiliki latar belakang etnis yang sama, seperti pada data berikut:

“Iye’, tellu liter kakao iya. Murahmi, tessalai pole dare.” (25)

Tuturan ini menunjukkan bahwa bahasa Bugis digunakan untuk membangun kedekatan sosial dan rasa saling percaya dalam transaksi. Dalam konteks ini, bahasa daerah berfungsi sebagai modal sosial (*social capital*) yang memperlancar proses tawar-menawar. Penggunaan bahasa yang sama antara penjual dan pembeli menciptakan suasana interaksi yang lebih akrab, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan transaksi.

Fenomena ini menegaskan bahwa komunikasi lintas budaya dalam konteks ekonomi tidak hanya didorong oleh faktor sosial atau kultural, tetapi juga oleh kebutuhan praktis untuk mencapai efisiensi dan keuntungan. Bahasa menjadi sarana negosiasi yang memungkinkan terjadinya pertukaran ekonomi secara lancar. Dengan demikian, praktik multilingualisme di wilayah perbatasan tidak dapat dilepaskan dari rasionalitas ekonomi masyarakat, di mana setiap penutur berupaya memaksimalkan keuntungan komunikatif dan ekonomi melalui kemampuan berbahasa yang adaptif dan kontekstual.

Dalam perspektif yang lebih luas, kondisi ini menunjukkan bahwa bahasa telah mengalami proses komodifikasi yaitu ketika bahasa tidak hanya berfungsi sebagai identitas budaya, tetapi juga sebagai sumber daya ekonomi yang memiliki nilai guna dalam interaksi pasar. Penutur yang mampu menguasai lebih dari satu bahasa memiliki keunggulan kompetitif dalam membangun relasi dengan berbagai kelompok etnis, sehingga berpotensi meningkatkan keberhasilan ekonomi mereka. Secara keseluruhan, faktor ekonomi tidak hanya memperkuat, tetapi juga mereproduksi praktik komunikasi lintas budaya di Desa Mayoa. Aktivitas ekonomi yang bersifat lintas etnis menciptakan kebutuhan berkelanjutan akan fleksibilitas linguistik, sehingga multilingualisme tidak hanya dipertahankan, tetapi juga terus dikembangkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa bahasa, ekonomi, dan struktur sosial saling berkelindan dalam membentuk praktik komunikasi masyarakat perbatasan yang dinamis, adaptif, dan berorientasi pada keberhasilan interaksi sosial maupun ekonomi.

#### 4. Faktor Pendidikan dan Institusi Formal

Faktor pendidikan memainkan peran strategis dalam membentuk sikap bahasa masyarakat di wilayah perbatasan. Lembaga pendidikan formal, khususnya sekolah dasar dan menengah, menjadi ruang institusional utama dalam proses sosialisasi bahasa nasional sekaligus arena interaksi antara Bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Dalam konteks wilayah perbatasan seperti Desa Mayoa, Bahasa Indonesia secara normatif digunakan sebagai bahasa pengantar utama sesuai dengan kebijakan pendidikan nasional. Namun demikian, realitas praktik di lapangan menunjukkan bahwa proses pembelajaran tidak berlangsung secara monolingual, melainkan bersifat adaptif terhadap kondisi sosiolinguistik peserta didik.

Guru-guru yang mengajar di wilayah pedesaan menunjukkan kecenderungan menggunakan strategi bilingualisme pedagogis, yaitu memadukan Bahasa Indonesia dengan bahasa lokal seperti Bugis dan Bare’e dalam proses pembelajaran. Strategi ini muncul sebagai respons terhadap latar belakang linguistik siswa yang umumnya menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pertama dalam lingkungan keluarga dan komunitas. Dalam perspektif sosiolinguistik pendidikan, praktik ini dapat dipahami sebagai bentuk *scaffolding* linguistik (Aini, 2025), di mana bahasa yang telah dikuasai siswa digunakan sebagai pijakan untuk memahami konsep baru dalam bahasa kedua. Dengan demikian, bahasa daerah berfungsi sebagai jembatan kognitif yang menghubungkan konsep-konsep abstrak dalam Bahasa Indonesia dengan pengalaman linguistik siswa sehari-hari.

Hal tersebut tercermin dalam pernyataan seorang guru di SMP Negeri di Mayoa sebagai berikut:

*“Kalau saya jelaskan pelajaran pakai bahasa Indonesia terus, anak-anak kadang bingung. Jadi saya campur sedikit Bugis atau Bare’e supaya mereka cepat paham.” (Wawancara, 2025)*

Pernyataan ini menunjukkan adanya kesadaran pedagogis sekaligus kesadaran linguistik dari pihak pendidik terhadap kebutuhan siswa. Guru tidak memposisikan bahasa daerah sebagai hambatan dalam pembelajaran, melainkan sebagai sumber daya linguistik (*linguistic resource*) yang dapat dimanfaatkan secara strategis. Dalam konteks ini, penggunaan bilingualisme di kelas merupakan bentuk akomodasi linguistik (Saptadi et al., 2024) yang bertujuan meningkatkan efektivitas pembelajaran serta mencegah terjadinya kesenjangan pemahaman antara guru dan siswa.

Institusi pendidikan juga berperan dalam membentuk keseimbangan antara fungsi instrumental Bahasa Indonesia dan fungsi identitas bahasa daerah. Bahasa Indonesia diposisikan sebagai sarana mobilitas sosial, akses terhadap pengetahuan formal, serta partisipasi dalam ruang publik yang lebih luas. Sementara itu, bahasa daerah tetap dipertahankan sebagai simbol identitas lokal dan media ekspresi budaya yang hidup dalam keseharian siswa. Keseimbangan ini penting untuk mencegah terjadinya pergeseran bahasa (*language shift*) yang berpotensi mengurangi vitalitas bahasa daerah, sekaligus mendorong terbentuknya kesadaran multibahasa yang sehat dan berkelanjutan.

Praktik alih kode dalam proses pembelajaran juga tampak dalam interaksi kelas, seperti pada tuturan berikut:

*“Anak-anak, ini namanya fotosintesis” (26)*

Dalam praktiknya, tuturan ini sering diikuti dengan penjelasan tambahan dalam bahasa daerah, misalnya penggunaan kata Bugis *iyaro* (itu) untuk memperjelas referensi konsep. Alih kode dari Bahasa Indonesia ke bahasa daerah dalam konteks ini berfungsi sebagai strategi penegasan makna (*meaning reinforcement*) yang membantu siswa memahami konsep abstrak melalui bahasa yang lebih familiar. Fenomena ini menunjukkan bahwa alih kode bukan merupakan bentuk ketidakkonsistenan bahasa, melainkan strategi pedagogis yang efektif dalam konteks multilingual.

Selain lembaga pendidikan formal, institusi sosial lainnya seperti pemerintahan dan lembaga keagamaan juga memainkan peran signifikan dalam membentuk praktik dan sikap bahasa masyarakat perbatasan. Dalam berbagai kegiatan keagamaan seperti ceramah, khutbah, dan pengajian, Bahasa Indonesia sering dipadukan dengan bahasa daerah. Penggunaan bahasa daerah dalam konteks ini berfungsi untuk memperdalam pemahaman pesan moral dan religius, sekaligus menciptakan kedekatan emosional antara penceramah dan jamaah.

Kombinasi bahasa tersebut menunjukkan adanya strategi komunikasi yang adaptif dan kontekstual. Bahasa Indonesia memberikan kerangka formal dan universal yang memungkinkan pesan dipahami secara luas, sementara bahasa daerah menghadirkan nuansa keakraban dan kedekatan kultural. Dalam perspektif komunikasi, praktik ini mencerminkan fungsi afektif bahasa, di mana bahasa daerah digunakan untuk membangun keterlibatan emosional dan memperkuat penerimaan pesan.

Dengan demikian, institusi keagamaan turut berperan dalam melestarikan praktik bilingualisme sekaligus memperkuat kohesi sosial lintas etnis di wilayah perbatasan. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai medium penyampaian ajaran agama, tetapi juga sebagai sarana integrasi sosial yang menghubungkan berbagai kelompok etnis dalam satu komunitas yang harmonis. Secara keseluruhan, faktor pendidikan dan institusi sosial berperan penting dalam menjaga keberlangsungan komunikasi lintas budaya di Desa Mayo. Melalui praktik bilingualisme yang dikelola secara fungsional, Bahasa Indonesia dan bahasa daerah tidak ditempatkan dalam hubungan yang saling meniadakan, melainkan saling melengkapi sesuai dengan domain penggunaannya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pendidikan dan institusi

sosial dapat menjadi agen utama dalam membangun sikap bahasa yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada harmonisasi antara identitas lokal dan kepentingan nasional.

## 5. Faktor Sikap Bahasa dan Toleransi Budaya

Sikap bahasa masyarakat di wilayah perbatasan menunjukkan tingkat toleransi dan keterbukaan linguistik yang relatif tinggi. Bahasa lain tidak dipersepsikan sebagai ancaman terhadap identitas kelompok, melainkan sebagai sumber daya sosial yang bernilai untuk memperluas jaringan pergaulan dan memperkuat relasi antar-etnis. Sikap ini berkembang seiring dengan intensitas interaksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari masyarakat perbatasan. Dalam perspektif sosiolinguistik, kondisi ini mencerminkan adanya sikap bahasa positif (*positive language attitude*) yang berkontribusi terhadap keberlangsungan praktik multilingualisme dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan menilai bahwa kemampuan menguasai lebih dari satu bahasa merupakan keterampilan sosial yang membanggakan dan bernilai positif. Multilingualisme dipandang sebagai modal sosial (*social capital*) yang memudahkan individu untuk beradaptasi dalam lingkungan multi-etnis. Hal ini tercermin dalam pernyataan seorang pemuda dari Desa Mayo sebagai berikut:

*“Kalau bisa tiga bahasa, kita gampang bergaul. Orang Bugis senang kalau kita bisa sedikit bahasanya. Jadi lebih akrab.” (Wawancara, 2025)*

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesadaran reflektif di kalangan generasi muda bahwa bahasa berfungsi sebagai jembatan sosial (*social bridge*). Penguasaan bahasa lain, meskipun dalam tingkat dasar, dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap kelompok etnis lain sekaligus sebagai strategi untuk membangun kedekatan interpersonal. Dalam konteks ini, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol itikad baik (*goodwill*) dan keterbukaan sosial.

Sikap toleransi linguistik tersebut terefleksikan dalam praktik penggunaan bahasa sehari-hari, seperti pada tuturan berikut:

Pemuda Bugis menyapa temannya dari etnis Pamona:

*“Tabea, iye’ apa kabar? Lama tidak ketemu.” (27)*

Penggunaan sapaan Pamona (*tabea*) oleh penutur Bugis menunjukkan adanya akomodasi linguistik (Giles, 1973) sebagai bentuk penghormatan terhadap identitas lawan tutur. Meskipun hanya berupa satu kata, tuturan ini memiliki nilai simbolik yang kuat dalam membangun kedekatan sosial dan menunjukkan pengakuan terhadap keberadaan budaya lain.

Fenomena ini semakin terlihat dalam praktik interaksi dua arah berikut: Penutur Bugis dan Pamona saling menyesuaikan bahasa:

A: *“Tabea, iye’ terima kasih sudah datang.”*

B: *“Iya, sama-sama. Senang bisa mosinggani di sini.” (28)*

Data ini menunjukkan adanya resiprositas linguistik (*linguistic reciprocity*), yaitu kecenderungan kedua penutur untuk saling menggunakan unsur bahasa masing-masing sebagai bentuk penghargaan dan strategi menjaga keharmonisan sosial. Dalam perspektif teori akomodasi komunikasi, praktik ini mencerminkan proses konvergensi linguistik, di mana penutur menyesuaikan bahasa mereka untuk mengurangi jarak sosial dan memperkuat solidaritas.

Penyesuaian linguistik tersebut tidak selalu bersifat penuh, melainkan sering diwujudkan dalam bentuk penggunaan kosakata dasar, ungkapan sapaan, atau ekspresi kesopanan dalam bahasa lawan bicara. Praktik ini menunjukkan adanya upaya simbolik untuk mengakui dan menghargai identitas linguistik pihak lain. Dengan demikian, bahasa berfungsi tidak hanya

sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai mekanisme sosial untuk menjaga harmoni dan mencegah potensi konflik dalam interaksi lintas budaya. Selain itu, sikap toleran juga tercermin dalam praktik resiprositas linguistik yang lebih luas, yaitu kecenderungan setiap kelompok etnis untuk saling mempelajari dan menggunakan unsur-unsur bahasa satu sama lain. Resiprositas ini tampak dalam penggunaan kata-kata dasar yang bersifat universal dalam interaksi sosial, seperti sapaan, ungkapan kesopanan, dan ekspresi keakraban. Praktik tersebut tidak semata-mata didorong oleh kebutuhan pragmatis, tetapi juga oleh nilai-nilai moral dan etika sosial yang menekankan pentingnya saling menghormati dan hidup berdampingan secara damai.

Dalam kerangka yang lebih luas, sikap bahasa yang inklusif ini berkontribusi terhadap terbentuknya kohesi sosial (*social cohesion*) yang kuat di wilayah perbatasan. Bahasa tidak lagi menjadi batas pemisah antaridentitas, melainkan menjadi ruang pertemuan yang memungkinkan terjadinya negosiasi identitas secara fleksibel dan konstruktif. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya memiliki kompetensi linguistik, tetapi juga kompetensi sosial-budaya dalam mengelola keberagaman. Dengan demikian, sikap bahasa masyarakat perbatasan mencerminkan orientasi sosial yang inklusif, adaptif, dan terbuka terhadap perbedaan. Bahasa dipahami sebagai ruang interaksi antaridentitas, bukan sebagai alat eksklusif. Kondisi ini menegaskan bahwa toleransi linguistik dan keterbukaan terhadap keberagaman bahasa merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan komunikasi lintas budaya serta pemeliharaan harmoni sosial di wilayah perbatasan.

## 6. Faktor Teknologi dan Media Sosial

Faktor teknologi dan media sosial merupakan elemen kontemporer yang semakin memperkuat praktik komunikasi lintas budaya di wilayah perbatasan. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi masyarakat dari yang semula berbasis ruang fisik menjadi juga berlangsung dalam ruang virtual yang lebih luas, terbuka, dan tidak terbatas secara geografis. Generasi muda di Desa Mayoa dan sekitarnya secara aktif memanfaatkan media sosial seperti Facebook, TikTok, dan WhatsApp sebagai sarana komunikasi utama dalam kehidupan sehari-hari. Melalui platform digital tersebut, interaksi tidak lagi terbatas pada konteks lokal seperti pasar, sekolah, atau lingkungan keluarga, tetapi meluas hingga ke jejaring sosial lintas wilayah dan lintas budaya.

Dalam konteks ini, praktik kebahasaan mengalami transformasi yang signifikan. Hasil observasi menunjukkan bahwa penggunaan bahasa di media sosial cenderung bersifat campuran, kreatif, dan ekspresif, khususnya dalam bentuk kombinasi antara bahasa Bugis–Indonesia dan Bare'e–Indonesia. Unggahan, komentar, serta percakapan dalam pesan singkat memperlihatkan kecenderungan penggunaan campur kode sebagai strategi komunikasi yang tidak hanya efektif, tetapi juga merepresentasikan identitas sosial penutur. Contoh ungkapan seperti “*Santai mi to, kerja dulu baru main!*” atau “*Tabea, selamat pagi kawan!*” (29) menunjukkan bahwa bahasa daerah tetap hadir secara aktif dalam ruang digital, berdampingan dengan bahasa Indonesia. Data berikut memperlihatkan praktik kebahasaan yang lebih spesifik:

Unggahan Facebook pemuda Bugis:

“*Santai mi to, kerja dulu baru healing*” (30)

Tuturan ini menunjukkan penggunaan partikel khas Bugis seperti *mi* dan *to* yang dipadukan dengan Bahasa Indonesia serta istilah populer dari bahasa global (*healing*). Campur kode dalam tuturan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol identitas lokal yang dinegosiasikan dalam konteks modern. Dengan demikian, bahasa menjadi medium representasi diri yang fleksibel, di mana unsur lokal dan global dapat hadir secara bersamaan.

Fenomena ini mengindikasikan munculnya apa yang dapat disebut sebagai register digital multibahasa, yaitu bentuk penggunaan bahasa yang khas di ruang digital yang bersifat informal,

cair, dan adaptif. Register ini memungkinkan penutur untuk mengekspresikan keakraban, humor, solidaritas sosial, serta identitas etnis tanpa terikat oleh norma kebahasaan formal. Dalam hal ini, bahasa daerah yang sebelumnya lebih dominan dalam ranah lisan kini mengalami perluasan fungsi ke ranah digital, sehingga meningkatkan visibilitas dan bahkan prestisenya di kalangan generasi muda. Jika dianalisis secara lebih komprehensif, faktor teknologi dan media sosial tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi secara erat dengan faktor-faktor lain yang telah dibahas sebelumnya, seperti faktor geografis, sosial-budaya, ekonomi, serta pendidikan dan institusi sosial. Seluruh faktor tersebut membentuk suatu sistem yang saling berkaitan dalam membangun dinamika komunikasi lintas budaya masyarakat perbatasan.

Dalam kerangka teoretis, fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep ekologi bahasa (*language ecology*) yang dikemukakan oleh Einar Haugen (1972) dalam (Mbeta, 20215). Haugen menyatakan bahwa keberlangsungan suatu bahasa sangat ditentukan oleh interaksi antara faktor lingkungan eksternal seperti kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, dan teknologi dengan sikap internal penutur terhadap bahasa tersebut. Bahasa tidak hidup secara terpisah, melainkan berada dalam suatu ekosistem yang dinamis, di mana setiap bahasa saling berinteraksi, beradaptasi, dan berkembang dalam konteks penggunaannya.

Dalam konteks Desa Mayoa, keseimbangan ekologi bahasa tersebut tampak terjaga dengan relatif baik. Tidak terdapat dominasi tunggal satu bahasa yang menggeser keberadaan bahasa lainnya secara signifikan. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai *lingua franca* yang bersifat instrumental, digunakan dalam komunikasi lintas etnis, pendidikan formal, serta ranah administratif dan publik. Sementara itu, bahasa daerah seperti Bugis dan Bare'e tetap memiliki fungsi yang kuat sebagai penanda identitas, solidaritas sosial, serta kedekatan emosional, baik dalam ranah keluarga, adat, maupun interaksi informal termasuk dalam ruang digital.

Pembagian fungsi bahasa ini bersifat komplementer, bukan kompetitif. Artinya, setiap bahasa memiliki domain penggunaan yang relatif jelas namun tetap fleksibel sesuai kebutuhan komunikasi. Kondisi ini menciptakan sistem kebahasaan yang stabil sekaligus adaptif terhadap perubahan sosial dan perkembangan teknologi. Dengan demikian, praktik komunikasi lintas budaya di wilayah perbatasan tidak hanya mencerminkan kemampuan linguistik masyarakat, tetapi juga menunjukkan tingkat kematangan sosial dalam mengelola keberagaman. Bahasa tidak diposisikan sebagai alat dominasi atau eksklusi, melainkan sebagai medium integrasi sosial, ekspresi identitas, serta adaptasi terhadap dinamika zaman. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat perbatasan, khususnya di Desa Mayoa, memiliki kapasitas yang kuat dalam mempertahankan keberagaman linguistik sekaligus berpartisipasi aktif dalam perkembangan sosial dan budaya yang lebih luas.

## **SIMPULAN**

Penggunaan bahasa dalam komunikasi lintas budaya pada masyarakat perbatasan antara Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, khususnya di Desa Mayoa, menunjukkan pola yang dinamis, adaptif, dan kontekstual. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai *lingua franca* yang digunakan dalam situasi formal, lintas etnis, serta dalam ranah institusional seperti pendidikan dan pemerintahan, sedangkan bahasa daerah seperti Bugis dan Bare'e berperan sebagai sarana ekspresi identitas, kedekatan emosional, dan solidaritas sosial dalam ranah informal, keluarga, dan komunitas. Praktik alih kode dan campur kode menjadi strategi utama dalam menjembatani perbedaan linguistik, sehingga komunikasi tetap efektif, inklusif, dan harmonis di tengah keberagaman budaya yang ada.

Keberlangsungan praktik komunikasi multibahasa tersebut didukung oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu kondisi geografis perbatasan yang mendorong mobilitas sosial tinggi, keberagaman sosial-budaya yang terintegrasi melalui relasi kekerabatan dan adat, kebutuhan ekonomi yang menuntut fleksibilitas komunikasi, peran pendidikan dan institusi

sosial dalam membentuk sikap bilingual, serta perkembangan teknologi digital yang memperluas ruang penggunaan bahasa. Selain itu, sikap bahasa masyarakat yang terbuka dan toleran menjadi fondasi utama dalam menjaga keseimbangan ekologi bahasa. Dengan demikian, komunikasi lintas budaya di wilayah ini tidak hanya mencerminkan kemampuan berbahasa, tetapi juga menunjukkan keberhasilan masyarakat dalam mengelola keberagaman secara konstruktif melalui praktik kebahasaan yang adaptif dan berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, C., Purba, K., Simarmata, R., Nurrin, J. M., & Wulandari, A. N. (2026). Fenomena Alih Kode dan Campur Kode dalam Komunikasi Digital: Studi Kasus Interaksi Mahasiswa Dwibahasawan di WhatsApp. *Mesada: Journal of Innovative Research*, 3(1), 176-181. <https://doi.org/10.61253/c33wvy44>
- Aini, M. R. (2025). Fenomena Campur Kode Dalam Pembelajaran Bahasa Inggris Di Sekolah Menengah Pertama: Analisis Sociolinguistik Dan Implikasi Pedagogis. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(5), 885-896. <https://doi.org/10.61722/jipm.v3i5.2177>
- Andriani, Z. (2024). *Analisis Pergeseran Penggunaan Bahasa Daerah dalam Komunikasi Masyarakat Di Desa Simpang Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).
- Dani, A. (2025). Bahasa sebagai Media Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal di Era Globalisasi. *Journal of Language Studies*, 1(2), 72-79. <https://doi.org/10.70716/jols.v1i2.81>
- Fajeri, I., & Samsuri, F. A. (2024). Fenomena Bilingualisme Di Kalangan Siswa SD: Dampak Terhadap Kemampuan Berbahasa. *JUPENSAL: Jurnal Pendidikan Universal*, 1(3), 506-513. <https://journalwbl.com/index.php/jupensal/article/view/353>
- Furqan, A., & Hartono, B. (2025). Penggunaan Campur Kode Dan Alih Kode Dalam Media Sosial: Analisis Sociolinguistik Pada Generasi Z di Indonesia. *Jurnal Inovasi Pendidikan Nusantara*, 2(2).
- Hasibuan, Z., Morelent, Y., & Isnanda, R. (2026). Variasi Bahasa Berfokus Pada Pengguna dalam Konteks Pendidikan: Dialek, Sosiolek, Gender, Usia, Dan Ragam Digital. *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, dan Inovasi*, 6(2). <https://doi.org/10.59818/jpi.v6i2.2736>
- Ibrahim, I. S., & Akhmad, B. A. (2014). *Komunikasi dan komodifikasi: Mengkaji media dan budaya dalam dinamika globalisasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Inayah, I. K., Kurnia, I., Farida, M. N., & Febrianti, P. A. (2024). Alih Kode Dan Campur Kode Pada Novel *Lovestruck* Karya Exsha Annisa Fitri. *Jurnal Basataka (JBT)*, 7(2), 404-409. <https://doi.org/10.36277/basataka.v7i2.449>
- Kusumanegara, A., Palawa, A. H., & Erdayani, R. (2024). *Studi Wacana Teori dan Penelitian*. PT. Raja Grafindo Persada-Rajawali Pers.
- Kusumawati, H., Adriana, I., & Romadhon, S. (2025). Fenomena Bilingualisme dan Diglosia pada Masyarakat Tutar Keturunan Arab di Kampung Arab Kota Pamekasan. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Metalingua*, 10(2), 121-134. <https://journal.trunojoyo.ac.id/metalingua/article/view/31741/11631>
- Maddimunri, A. R., Dalle, A., & Nensilanti, N. (2025). Interaksi Linguistik Antara Bahasa Indonesia Penutur Dialek Maluku dan Penutur Bahasa Bugis Perantau di Kota Tual: Kajian Sociolinguistik. *Bahasa: Jurnal Keilmuan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 7(2), 551-569. <https://doi.org/10.26499/bahasa.v7i2.1565>
- Marpaung, J. H., Simanjuntak, R. D., Purba, A. R., & Saragih, R. (2025). Pergeseran Bahasa pada Anak-Anak dari Keluarga Suku Batak Toba di Kota Medan. *Jurnal Pendidikan Bahasa*, 15(1), 21-27. <https://doi.org/10.37630/jpb.v15i1.3208>
- Matthew B. Miles & A. Michael Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mbete, A. M. (2015). Pembelajaran bahasa berbasis lingkungan: Perspektif ekolinguistik. *RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa*, 1(2), 352-364.

- Milal, M. S. (2021). Menilik Modal Simbolik Halimi Zuhdy sebagai Sastrawan Arab dari Indonesia. *Adabiyat: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 5(1), 115-132. <https://doi.org/10.14421/ajbs.2021.05106>
- Mu'in, F. (2025). *Linguistik Terapan: Teori dan Praktik*. CV Eureka Media Aksara.
- Navita, N., Handayani, A., & Rosidin, O. (2025). Analisis Kontrastif Kata Sapaan/Panggilan dalam Keluarga Pada Bahasa Sunda dan Bahasa Indonesia. *Jurnal Bastra (Bahasa dan Sastra)*, 10(3), 930-945. <https://doi.org/10.36709/bastra.v10i3.1499>
- Rahmawati, R. D., Mulyadi, S., & Aulia, D. (2025). Program Bilingual Terhadap Perkembangan Bahasa Anak (Studi Literatur Pada Anak Usia Dini). *JECIE (Journal of Early Childhood and Inclusive Education)*, 9(1), 143-151. <https://doi.org/10.31537/jecie.v9i1.1887>
- Resky, A. S. F. (2026). Fenomena Campur Kode Dan Alih Kode Dalam Praktik Komunikasi Multi-bahasa Masyarakat Perkotaan. *Jurnal Ilmu Bahasa, Sastra, dan Budaya*, 2(1), 19-24.
- Riswandi, B., & Sunendar, D. (2026). Relasi Sakral Manusia–Alam dalam Cerita Rakyat Panjalu: Kajian Struktural Terhadap Tradisi Nyangku Sebagai Media Transmisi Nilai Budaya. *Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 22(1), 236-250.
- Rudiati, E. (2018). *Malayndonesia: Integrasi ekonomi di Perbatasan Indonesia-Malaysia: Sebatik Kalimantan Utara-Tawau Sabah*. Bening Era.
- Sapiah, S., Judijanto, L., Bunga, J., Sholihah, R. A., Krisifu, A., Kocu, S., ... & Rochma, A. F. (2025). *Pengantar Linguistik*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Saptadi, N. T. S., Andriani, R., Hayati, R., Raju, M. J., Maulani, G., Wardoyo, T. H., & Hadikusumo, R. A. (2024). *Pendidikan multilingual: Teori dan praktik*. Sada Kurnia Pustaka.
- Suharti, S., Hum, S., Khusnah, W. D., Ningsih, S., Shiddiq, J., Saputra, N., ... & Purba, J. H. (2021). *Kajian psikolinguistik*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Suryawin, P. C., Wijaya, M., & Isnaini, H. (2022). Tindak Tutur (Speech Act) dan Implikatur dalam Penggunaan Bahasa. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan*, 1, 29-36.
- Syamsurijal, S. (2023). *Penggunaan Bahasa di Ruang Publik: Studi Lanskap Linguistik Di Pusat Perbelanjaan Kota Makassar* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Yunidar, M. (2025). *Bahasa, budaya, dan masyarakat: Perspektif sosiolinguistik kontemporer*. Kaizen Media Publishing.
- Zahra, H. N., Kurnia, I., Agustin, V. P., & Lathifah, I. D. (2025). Analisis Campur Kode dan Alih Kode Novel “Minori Mengejar Cinta” Karya Viera Fitani. *Jurnal Basataka (JBT)*, 8(2), 822-834. <https://doi.org/10.36277/basataka.v8i2.794>